

ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2015-2024

Skripsi



Oleh:

Nama : Rianda Lintang Gumelar

Nomor Mahasiswa : 22313034

Program Studi : Ekonomi pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2026

ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI
INDONESIA TAHUN 2015-2024

SKRIPSI

Disusun dan diujikan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1

Program studi ekonomi pembangunan

Fakultas bisnis dan ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Rianda Lintang Gumelar

Nomor Mahasiswa : 22313034

Program Studi : Ekonomi pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2026

Hasil Plagiarisme



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Pantadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55281
T. (0274) 801546, 803037, 805376;
F. (0274) 802589
E. kef@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 2831/Ka.Div/10/Div.PP/TV/2026

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rianda Lintang Gumelar
Nomor Mahasiswa : 22313034
Dosen Pembimbing : Prof. Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D.
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Karya Ilmiah : Analisis Disparitas Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **4 % (empat persen)** sesuai aturan batas maksimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 April 2026

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suwardi, S.IP., M.IP.



Berita Acara



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Paradiredja
Universitas Islam Indonesia
Candong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbs@uii.ac.id
W. fbs.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nomor: 042/Ka.ProdiEp/10/Prodi.Ep/UTA/VI/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2025/2026, hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RIANDA LINTANG GUMELAR
NIM : 22313034
Judul Tugas Akhir : ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI
INDONESIA TAHUN 2015-2024
Dosen Pembimbing : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.
Anggota Tim : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2024

Nama : Rianda Lintang Gumelar
Nomor Mahasiswa : 22313034
Program Studi : Ekonomi pembangunan

Yogyakarta, 10 April 2026

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Prof. Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji syukur tak henti penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah dilimpahkan, sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menuntaskan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan tulus kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, inspirasi dan kekuatan terbesar penulis. Terima kasih atas doa yang terus mengalir tanpa putus, serta dukungan luar biasa yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Diri sendiri, terima kasih sudah mampu bertahan, berjuang dengan sabar, dan tidak menyerah meski prosesnya tidak mudah. Terima kasih telah sampai di titik ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendampingi serta mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen FBE UII, atas ilmu bermanfaat dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi, sehingga proses pembelajaran penulis dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub

Segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2024”. Karya ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan program Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membimbing, memberi dukungan, serta menemani langkah penulis dalam melewati perjalanan panjang hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT dengan segala karunia, hidayah, dan kekuatan-Nya yang tidak pernah putus, sehingga penulis mampu melangkah hingga titik penyelesaian skripsi ini.
2. Sudarmadi selaku ayah dan Rini Subekti selaku ibu penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi selama proses studi dan pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi penulis di masa depan.
5. Sahabat penulis Hisyam, Jiddan, Syania, Dinna, dan Hana yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan semangat serta kebersamaan penulis selama awal hingga akhir masa studi ini.
6. Teman - teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan
7. Untuk diri penulis sendiri yang tidak lupa akan amanah serta tanggung jawabnya sehingga mampu melalui semua proses perkuliahan dan sampai pada penyelesaian tugas akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang, baik bagi penulis pribadi maupun bagi rekan-rekan yang akan menyusun karya ilmiah selanjutnya. Besar harapan penulis agar penelitian ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata serta menjadi referensi yang berguna bagi banyak pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 April 2026

Penulis,



Rianda Lintang Gumelar

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Disparitas Pendapatan	10
2.1.2 Tingkat Pengangguran	10
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia	11
2.1.4 Tingkat Kemiskinan.....	11
2.1.5 Investasi terbuka	12
2.1.6 Jumlah Penduduk.....	12
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Disparitas Pendapatan	13
2.2.2 Tingkat Pengangguran	14
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	15
2.2.4 Tingkat Kemiskinan	17
2.2.4 Investasi Terbuka	18
2.2.5 Jumlah Penduduk	19
2.3 Hipotesis Penelitian.....	20
2.4 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB 3	23

METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian Dan Sumber Data.....	23
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	23
3.2.1 Variabel Terikat (Dependen)	23
3.2.2 Variabel bebas (Independen)	24
3.3 Metode Analisis	24
3.3.1 Model Estimasi Data Panel	24
3.3.1.1 Model Common Effect	26
3.3.1.2 Model Fixed Effect.....	26
3.3.1.3 Model Random Effect	26
3.3.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel	26
3.3.2.1 Uji Chow	27
3.3.2.2 Uji Hausman	27
3.3.2.3 Uji LM	28
3.3.3 Uji Statistik	28
3.3.3.1 Koefisien Determinasi	28
3.3.3.2 Uji F	28
3.3.3.3 Uji t	29
BAB IV	29
HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	29
4.2 Hasil dan Analisis Data.....	30
4.2.1 Uji Chow.....	30
4.2.2 Uji Hausman.....	30
4.2.3 Uji LM.....	31
4.3 Model Terbaik (<i>Random Effect Model</i>)	32
4.4 Uji Statistik	34
4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	34
4.4.2 Uji F.....	34
4.5 Pembahasan	37
4.5.1 Pengaruh Variabel Pengangguran Terhadap Disparitas Pendapatan	37

4.5.2 Pengaruh Variabel IPM Terhadap Disparitas Pendapatan	37
4.5.3 Pengaruh Variabel Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan	38
4.5.4 Pengaruh Variabel Investasi Terhadap Disparitas Pendapatan	39
4.5.5 Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan	40
BAB V	41
SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	41
5.1 Simpulan	41
5.2 Implikasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN II	59
Regresi Command	59
LAMPIRAN III.....	59
Uji Chow.....	59
LAMPIRAN IV	60
Uji Hausman.....	60
LAMPIRAN V.....	60
Uji LM	60
LAMPIRAN VI	61
Uji Random Effect Model.....	61
LAMPIRAN VII.....	62
Uji t.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gini Rasio Indonesia 2015-2024.....	2
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2015-2024.....	5
Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	14
Gambar 2.4.1 Kerangka Pemikiran.....	22

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, investasi terbuka, dan jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia pada periode 2015 - 2024. Menggunakan metode analisis regresi data panel, penelitian ini mengkaji pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap indeks Gini sebagai indikator disparitas pendapatan. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, investasi terbuka, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk menunjukkan hubungan positif, sementara investasi terbuka menunjukkan hubungan negatif terhadap disparitas pendapatan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan manusia yang lebih merata guna mengurangi disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : disparitas pendapatan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, investasi terbuka, dan jumlah penduduk

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

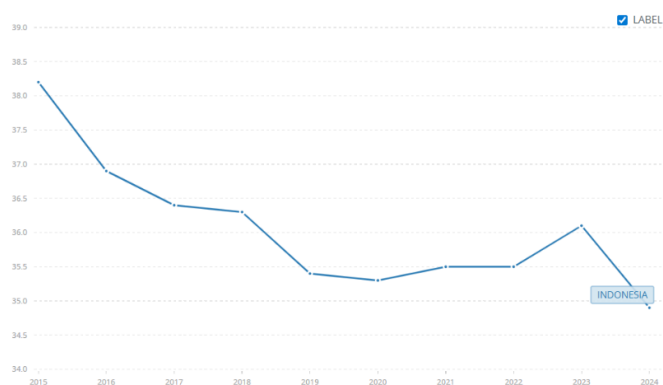
Pembangunan pada dasarnya adalah proses keberlanjutan yang diarahkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimilikinya, merancang strategi pembangunan, dan kemudian melaksanakannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan standar hidup di semua lapisan serta menciptakan perekonomian yang lebih baik. Meningkatkan kesejahteraan merupakan tujuan semua negara, dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga agar ekonomi tetap stabil. Oleh karena itu, setiap rencana dan upaya yang dijalankan harus selalu mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang seimbang dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. (Dwira & Maulana, 2023)

Disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia tetap menjadi isu struktural yang dominan meskipun perekonomian nasional mencatat pertumbuhan positif selama satu dekade terakhir. Berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum terdistribusi secara merata, baik antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan yang berpotensi menghambat pembangunan yang inklusif. Dalam konteks ini, analisis disparitas pendapatan antar provinsi pada periode 2015–2024 menjadi penting untuk memahami dinamika ketimpangan dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan pemerintah pusat maupun daerah. (Laili Nurhasanah, 2024)

Secara makro, Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan nasional, namun jumlah penduduk miskin masih mencapai lebih dari 25 juta orang

pada tahun 2024, dengan konsentrasi kemiskinan yang tinggi di beberapa provinsi tertinggal seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dari perbedaan tingkat kemiskinan, tetapi juga dari variasi pendapatan per kapita dan akses terhadap pelayanan dasar di berbagai provinsi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa isu ketimpangan pendapatan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga terkait dengan dimensi sosial dan spasial pembangunan. (Lania et al., 2025)

Indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini, yang nilainya berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Dalam konteks Indonesia, nilai Gini nasional dalam satu dekade terakhir berada pada kisaran ketimpangan menengah, sementara di tingkat provinsi tampak variasi yang cukup luas, menggambarkan adanya disparitas yang signifikan antarwilayah. Selain Indeks Gini, sejumlah penelitian menggunakan indeks Williamson dan indikator lain untuk menangkap dimensi ketimpangan regional yang tidak sepenuhnya tercermin dari distribusi pendapatan rumah tangga saja. (HM, 2011)



Gambar 1.1 Gini Rasio Indonesia 2015-2024

Sumber "World Bank tahun 2024"

Rasio Gini Indonesia menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun perlahan sepanjang periode 2015–2024. Pada tahun 2015, nilai rasio Gini tercatat sekitar 38,6 yang mencerminkan tingkat disparitas pendapatan menengah ke atas. Angka tersebut kemudian menurun secara bertahap menjadi sekitar 36,0 pada 2018, menandakan adanya perbaikan distribusi pendapatan nasional. Namun, pada periode 2019–2021 rasio Gini relatif stabil di kisaran 35,8–36,2 dengan sedikit peningkatan selama pandemi COVID-19 akibat melemahnya akses terhadap lapangan kerja dan sumber pendapatan, khususnya di sektor informal. Setelah pandemi, ketimpangan sempat meningkat kembali hingga sekitar 36,5 pada 2022–2023, mencerminkan bahwa proses pemulihan ekonomi belum berjalan merata di seluruh provinsi. Meski demikian, pada 2024 rasio Gini turun signifikan ke sekitar 35,0, menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Pola ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar provinsi masih cukup signifikan. (Wordbank, 2024)

Ketimpangan pendapatan antar provinsi juga berkaitan erat dengan perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Provinsi dengan basis industri dan jasa yang kuat, infrastruktur memadai, dan konsentrasi kegiatan ekonomi modern cenderung memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding daerah yang masih bergantung pada sektor primer tradisional. Kesenjangan dalam kapasitas fiskal memperkuat disparitas, karena daerah dengan penerimaan yang besar lebih leluasa membiayai layanan publik dan investasi pembangunan, sementara daerah berkapasitas rendah tertinggal dalam penyediaan infrastruktur dan kualitas SDM. (Ocsa et al., 2025)

Tren ketimpangan di beberapa kawasan menunjukkan pola yang tidak seragam. Di Pulau Sumatera, misalnya, ketimpangan pendapatan antar provinsi yang diukur dengan Gini ratio pada periode 2019–2023 cenderung fluktuatif, dengan beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau dan Bengkulu tercatat memiliki Gini ratio relatif lebih tinggi pada tahun-tahun akhir periode. Sementara itu, beberapa provinsi menunjukkan penurunan ketimpangan dalam beberapa tahun

terakhir, yang dapat dikaitkan dengan intervensi kebijakan dan dinamika sektor ekonomi lokal. Pola fluktuatif ini menegaskan perlunya analisis jangka panjang untuk memahami faktor pendorong dan penghambat pemerataan pendapatan antar provinsi. (Asykurunnizza et al., 2025)

Berbagai studi juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan seringkali berjalan beriringan dengan masalah sosial lain seperti pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Penelitian yang mengkaji hubungan antara Gini ratio, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia menemukan bahwa tingginya ketimpangan dapat menghambat capaian pembangunan manusia yang lebih merata. Dengan demikian, disparitas pendapatan antar provinsi tidak hanya mencerminkan kesenjangan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperlebar jarak kualitas dan kesempatan hidup antar penduduk di berbagai wilayah. (Fibriani, 2025)

Meskipun ketimpangan pendapatan nasional sempat menurun setelah periode krisis global dan pandemi, sejumlah kajian menyatakan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia tetap tergolong tidak merata. Income inequality antara provinsi seperti Papua dan DKI Jakarta, misalnya, menunjukkan kontras yang mencolok dalam hal pendapatan, infrastruktur, dan akses terhadap layanan publik. Ketidakmerataan ini menjadi tantangan serius bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh provinsi di Indonesia. (Khairunnisa, 2024)

Penelitian empiris mengenai ketimpangan regional antar provinsi di Indonesia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi pemerataan pembangunan justru dapat memperlebar ketimpangan. Dalam sebuah studi panel terhadap 34 provinsi, pertumbuhan ekonomi ditemukan berpengaruh positif terhadap ketimpangan ketika terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara peningkatan kapasitas fiskal dan infrastruktur berperan menurunkan ketimpangan

regional. Temuan ini menegaskan pentingnya kombinasi kebijakan pertumbuhan dan pemerataan untuk mengurangi disparitas antar provinsi. (Rambey, 2018)

Tahun	Tingkat Pengangguran
2015	9.02
2016	5.61
2017	8.44
2018	8.01
2019	8.16
2020	11.19
2021	11.46
2022	9.55
2023	8.83
2024	7.40

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2015-2024

Sumber “Badan Pusat Statistik Tahun 2024”

Sejumlah penelitian lain menyoroti peran pengangguran dan kemiskinan sebagai determinan penting ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Studi panel pada 34 provinsi Indonesia periode 2017–2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data tingkat pengangguran di Indonesia periode 2015–2024 terlihat bahwa kondisi pasar kerja mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan penurunan dari 9.02 persen pada 2015 menjadi 5.61 persen pada 2016, kemudian kembali meningkat hingga mencapai 11.46% pada 2021 sebelum turun menjadi 7.40 % pada 2024. Pola ini

mencerminkan adanya gejolak ekonomi yang kuat, terutama pada masa pandemi 2020–2021, serta belum meratanya pemulihan kesempatan kerja di seluruh wilayah. (Hindun et al., 2019)

Selain faktor-faktor ekonomi makro, karakteristik demografis dan pasar tenaga kerja juga berkontribusi terhadap disparitas pendapatan antar provinsi. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja, struktur sektor pekerjaan, dan kualitas pendidikan tenaga kerja menyebabkan produktivitas dan pendapatan antar daerah menjadi tidak seragam. Di beberapa wilayah, sentralisasi industri dan konsentrasi lapangan kerja formal mendorong pendapatan yang lebih tinggi, sementara daerah dengan dominasi sektor informal menghadapi keterbatasan dalam peningkatan kesejahteraan. (Mangundap1 et al., 2024)

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas ketimpangan pendapatan dan disparitas regional di Indonesia, sebagian besar kajian fokus pada periode waktu yang relatif pendek atau terbatas pada kawasan tertentu. Beberapa studi hanya meneliti satu pulau atau satu provinsi, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika disparitas pendapatan antar seluruh provinsi secara nasional dalam jangka panjang. Selain itu, sejumlah penelitian menggunakan rentang tahun sebelum 2020 atau mengakhiri periode analisis pada beberapa tahun awal setelah pandemi, sehingga belum menangkap perkembangan terkini hingga 2024. (Putri et al., 2025)

Keterbatasan lain yang muncul adalah perbedaan indikator dan pendekatan analitis yang digunakan, sehingga hasil dan rekomendasi kebijakan dari berbagai studi seringkali sulit dibandingkan secara langsung. Sebagian penelitian mengutamakan fokus hanya pada satu indikator seperti indeks Gini atau Williamson, sementara variabel lain seperti kapasitas fiskal, kualitas infrastruktur, dan variabel sosial-demografis belum selalu diintegrasikan secara komprehensif dalam satu kerangka analisis. Hal ini menciptakan celah penelitian dalam hal pemetaan menyeluruh terhadap disparitas pendapatan antar provinsi Indonesia

dengan memanfaatkan data terbaru dan pendekatan kuantitatif yang konsisten. (Alisjahbana, 2012)

Pada tahun 2019-2023, periode ini juga ditandai oleh beberapa gejolak besar seperti perlambatan ekonomi global dan pandemi Covid-19 yang berpotensi mengubah pola ketimpangan pendapatan antar provinsi. Tidak semua studi yang ada memasukkan fase sebelum dan sesudah pandemi secara utuh, sehingga dinamika perubahan ketimpangan akibat shock eksternal dan kebijakan pemulihan ekonomi belum banyak dikaji secara berkala di semua provinsi. Sementara, pemahaman atas perubahan struktur ketimpangan dalam periode tersebut sangat penting untuk merancang kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap risiko ke depan. (Nurrohim et al., 2024)

Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Investasi, Jumlah Penduduk dengan disparitas pendapatan dalam kerangka analisis data panel provinsi di Indonesia. Kajian ini dapat menguji kembali temuan-temuan sebelumnya tentang peran pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan faktor sosial terhadap ketimpangan dengan rentang waktu dan cakupan wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai ketimpangan regional di negara berkembang dengan karakteristik kepulauan seperti Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, disparitas pendapatan 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2024 memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks gini. Sehingga penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh dari faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan harapan pemerintah dapat mengetahui pengaruh dari faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin memburuk kedepannya dan apakah faktor tersebut mempengaruhi ketimpangan pendapatan di tahun berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dengan itu penulis

bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian “ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024?
4. Bagaimana pengaruh Investasi Terbuka terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024?
5. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat pengangguran terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
4. Untuk menganalisis pengaruh Investasi Terbuka terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
5. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terkait determinan disparitas pendapatan dengan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, investasi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia dalam periode 2015–2024. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kajian ekonomi pembangunan dan literatur mengenai ketimpangan regional di negara berkembang. Selanjutnya, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan empiris untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan fiskal serta upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.
2. Penelitian ini membantu dalam merumuskan strategi pengendalian disparitas pendapatan antar provinsi, guna mengurangi dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi wilayah. Selain itu, hasil kajian dapat menjadi bahan informasi untuk perencanaan kebijakan ketenagakerjaan dan kependudukan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mengurangi ketimpangan antar daerah. Selanjutnya, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas berbagai kebijakan ekonomi yang telah diterapkan pemerintah selama periode 2015–2024 dalam upaya menurunkan disparitas pendapatan di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka sebagai kerangka utama untuk menggabungkan informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk keperluan tinjauan ini penulis telah mengumpulkan sejumlah data dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. Penggunaan kajian

pustaka ini diharapkan dapat mempermudah proses penulisan penelitian secara keseluruhan.

Penulis menemukan bahwa sudah ada beberapa riset terdahulu yang berupaya mengamati bagaimana disparitas dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan, baik dari sisi variabel, tujuan, maupun objek yang diteliti, penulis memilih berdasarkan ada tidaknya kesamaan variabel. Kesamaan ini penting agar riset-riset tersebut dapat dijadikan rujukan dan acuan yang kuat bagi penelitian saat ini, serta untuk memastikan keaslian penelitian dan menghindari adanya plagiarisme. Berikut adalah beberapa kajian pustaka yang telah dilakukan penulis dari hasil penelitian terdahulu.

2.1.1 Disparitas Pendapatan

Menurut (Imaniah et al., 2024), disparitas pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan regional antar provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penentu disparitas pendapatan, khususnya struktur ekonomi dan kapasitas fiskal, di 34 provinsi Indonesia periode 2016–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi panel data dengan model random effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa disparitas pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Williamson sebagai indikator ketimpangan regional, dimana kesenjangan struktur ekonomi antar provinsi memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan, konsisten dengan teori New Economic Geography tentang aglomerasi dan divergensi regional.

2.1.2 Tingkat Pengangguran

Menurut (Yoertiara & Feriyanto, 2022), tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 6 provinsi Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap disparitas pendapatan periode 2012–2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Jawa, dimana pengangguran yang lebih tinggi memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan, konsisten dengan hipotesis Okun tentang hubungan pengangguran dan ketimpangan ekonomi.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kombinasi yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Konsep IPM berasal pada *capability approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen, yang menekankan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kemampuan dan pilihan hidup manusia, bukan hanya meningkatkan pendapatan semata (Anand & Sen, 1994). Peningkatan IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan sosial (Ranis et al., 2000). Namun demikian, nilai IPM yang tinggi tidak selalu mencerminkan pemerataan pembangunan karena masih dapat menutupi ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan antar kelompok masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan (UNDP, 2020).

2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Menurut (Mulyo & Seleky, 2015), tingkat kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kemiskinan dan faktor ekonomi lainnya terhadap indeks Gini pada 34 provinsi periode 2015–2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi panel data dengan pendekatan fixed effect model. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dimana peningkatan kemiskinan memperlebar disparitas distribusi pendapatan

secara regional, konsisten dengan teori bahwa kemiskinan struktural memperburuk kesenjangan ekonomi.

2.1.5 Investasi terbuka

Menurut (Astary et al., 2024) investasi terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 provinsi periode 2018–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi panel data dengan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Gini sebagai proksi ketimpangan pendapatan, dimana peningkatan investasi terbuka cenderung memperlebar disparitas distribusi pendapatan secara regional, konsisten dengan hipotesis bahwa investasi berkontribusi terhadap kesenjangan melalui efek aglomerasi.

2.1.6 Jumlah Penduduk

Menurut (Firdaus & Hasmarini, 2023), jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jumlah penduduk, upah minimum kabupaten, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2015–2022. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi panel data dengan model fixed effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan ($p\text{-value } 0.00222 < 0.01$), dimana peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi peningkatan kualitas SDM cenderung memperlebar disparitas distribusi pendapatan secara regional, konsisten dengan teori bahwa tekanan demografis memperburuk kesenjangan ekonomi.

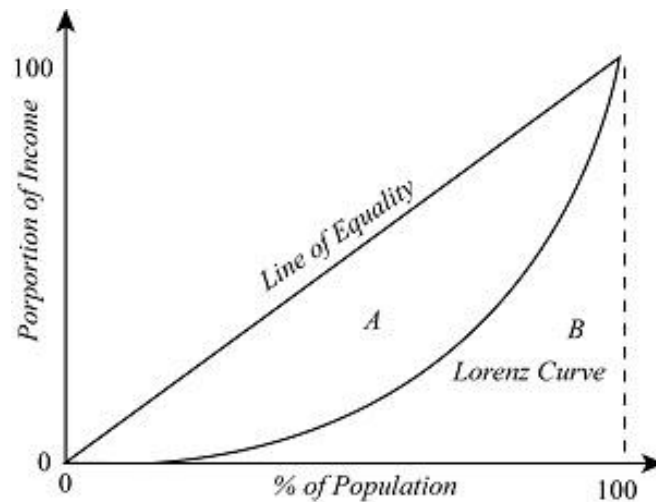
2.2 Landasan Teori

2.2.1 Disparitas Pendapatan

Pandangan strukturalis berpendapat bahwa kesenjangan muncul akibat masalah mendasar seperti ketidakmerataan kepemilikan sumber daya dan ketergantungan pada sektor primer, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah untuk memperbaikinya. Sebaliknya, menurut (Afif, 2022), teori neoklasik melihat ketimpangan sebagai bagian alami dari proses pasar yang dapat diredam melalui pertumbuhan ekonomi, liberalisasi perdagangan, serta investasi pada infrastruktur dan pendidikan. Perbedaan utama keduanya terletak pada tumpuan solusinya, dimana strukturalis menekankan intervensi negara sementara neoklasik lebih mempercayai efisiensi mekanisme pasar.

Dampak dari ketimpangan ini sangat signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan suatu negara. (Wahyuni & Andriyani, 2022) mengungkapkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata memicu inefisiensi ekonomi, melemahkan solidaritas sosial, serta mengganggu stabilitas dan alokasi aset. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat guna mencegah munculnya kesenjangan. Fenomena nyata ini terjadi di negara maju maupun berkembang, meskipun terdapat perbedaan dalam skala ketimpangan serta tingkat kesulitan penanganannya yang dipengaruhi oleh faktor luas wilayah dan jumlah populasi penduduknya.

Untuk mengukur fenomena ini secara kuantitatif, (M.Anas et al., 2019) menjelaskan penggunaan Kurva Lorenz yang memetakan hubungan antara persentase penerima pendapatan dengan total pendapatan yang diterima dalam satu periode. Kurva ini digambarkan dalam sebuah bujur sangkar dengan sumbu vertikal sebagai akumulasi pendapatan nasional dan sumbu horizontal sebagai akumulasi jumlah penduduk.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Tingkat keadilan distribusi pendapatan dapat dilihat dari posisi kurva terhadap garis diagonal utama semakin lurus atau dekat kurva dengan garis diagonal, maka distribusi pendapatan dinilai semakin merata. Sebaliknya, semakin melengkung atau menjauh kurva tersebut dari garis diagonal, maka menunjukkan kondisi ketimpangan yang semakin buruk.

2.2.2 Tingkat Pengangguran

Pandangan strukturalis menjelaskan bahwa pengangguran muncul akibat permasalahan mendasar dalam struktur perekonomian, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja, perubahan struktur produksi, serta keterbatasan mobilitas tenaga kerja antar sektor maupun wilayah. Dalam perspektif ini, pengangguran bersifat berkelanjutan karena dipengaruhi oleh faktor institusional, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendekatan strukturalis menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan, reformasi pasar tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja produktif guna mengurangi pengangguran struktural (Phelps, 1994).

Sebaliknya, teori neoklasik memandang pengangguran sebagai bagian dari proses penyesuaian pasar tenaga kerja. Pengangguran terjadi akibat

ketidakseimbangan sementara antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang dipicu oleh rigiditas upah, informasi yang tidak sempurna, atau kebijakan yang menghambat fleksibilitas pasar (Borjas., 2024). Dalam jangka panjang, mekanisme pasar diyakini mampu menekan tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta akumulasi modal manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang dianjurkan dalam perspektif neoklasik berfokus pada penciptaan iklim pasar yang efisien dan peningkatan produktivitas tenaga kerja (Mankiw et al., 2021).

Perbedaan utama antara pendekatan strukturalis dan neoklasik terletak pada sumber penyebab dan solusi pengangguran. Strukturalis menekankan perlunya kebijakan negara yang aktif untuk mengatasi permasalahan struktural dalam pasar tenaga kerja, sedangkan neoklasik lebih mempercayai efektivitas mekanisme pasar dalam menciptakan keseimbangan tenaga kerja. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, terutama di negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan struktur ekonomi yang belum matang.

Pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan nasional, meningkatkan kemiskinan, serta menimbulkan masalah sosial seperti ketimpangan dan instabilitas. Oleh karena itu, pengendalian tingkat pengangguran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur serta membandingkan pencapaian dalam hal harapan hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup masyarakat. Melalui indeks ini, sebuah negara dapat dikategorikan ke dalam kelompok negara maju, berkembang, atau terbelakang, sekaligus menjadi parameter untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Merujuk pada

data (BPS, 2023), angka IPM diperoleh melalui perhitungan matematis yang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kes} \times I_{Pend} \times I_{Luar} \times 100}$$

Keterangan :

IPM : *Indeks Pembangunan Manusia*

IKes : *Indeks Kesehatan*

IPend : *Indeks Pendidikan*

ILuar : *Indeks Pengeluaran*

$IPM \geq 80$: *Sangat Tinggi*

$70 \leq IPM \leq 80$: *Tinggi*

$60 \leq IPM \leq 70$: *Sedang*

$IPM < 60$: *Rendah*

Pada dasarnya, konsep pembangunan manusia menekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara utuh, yang mencakup aspek fisik, mental, hingga spiritual. Pembangunan ini dibentuk oleh tiga dimensi utama, yaitu kesehatan yang optimal dan umur panjang, akses terhadap ilmu pengetahuan, serta ketersediaan standar hidup yang mencukupi. Berdasarkan standar (BPS, 2023), pengukuran dimensi kesehatan didasarkan pada angka harapan hidup. Sementara itu, dimensi pengetahuan diukur melalui indikator harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak dinilai berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat sebagai faktor penentunya.

Pembangunan yang memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator menyeluruh untuk melihat sejauh mana kualitas hidup masyarakat di suatu daerah, yang hasilnya ditentukan oleh berbagai kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Naik atau turunnya angka IPM menjadi petunjuk konkret mengenai efektivitas kinerja pembangunan manusia di daerah itu. Berdasarkan teori dari *United Nations Development Program* (UNDP), terdapat tiga pilar utama yang mendasari penghitungan IPM:

- a. Aspek kesehatan dan umur panjang, yang dinilai berdasarkan angka harapan hidup saat bayi lahir serta tingkat kematian bayi per seribu penduduk.
- b. Akses terhadap sumber daya ekonomi, yang diukur melalui PDB riil per kapita menggunakan standar keseimbangan kemampuan berbelanja (*purchasing power parity*) dalam satuan dolar AS, serta dapat ditambah dengan data angkatan kerja.
- c. Pencapaian pendidikan, yang dipantau melalui dua indikator, yaitu angka melek huruf pada masyarakat berusia 15 tahun ke atas dan rata-rata durasi sekolah bagi penduduk yang telah berusia di atas 25 tahun.

2.2.4 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan dipahami sebagai kondisi kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, yang berdampak langsung pada kualitas hidup seseorang. Fenomena ini juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, yang seharusnya menjadi sarana untuk keluar dari jerat ekonomi sekaligus mendapatkan martabat sebagai warga negara. Secara lebih luas, kemiskinan mencakup tiga dimensi utama, yakni kekurangan materi berupa kelangkaan barang dan layanan dasar, keterbatasan sosial yang memicu pengucilan serta ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat, serta rendahnya tingkat penghasilan dan kekayaan yang dimiliki individu.

Mengenai polanya, (Djojohadikusumo, 1995) mengidentifikasi empat jenis kemiskinan yang berbeda. Pertama adalah Persistent Poverty yaitu kemiskinan kronis yang terjadi secara turun-temurun. Yang kedua yaitu Cyclical Poverty yang fluktuasinya mengikuti kondisi ekonomi makro. Ketiga, Seasonal Poverty yang bergantung pada waktu tertentu seperti yang dialami oleh para nelayan. Keempat adalah Accidental Poverty yang muncul secara mendadak akibat bencana alam atau dampak langsung dari kebijakan tertentu yang menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, (Arsyad, 1999) mengklasifikasikan ukuran kemiskinan ke dalam tiga kategori utama yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kondisi ini dialami oleh seseorang yang memiliki pendapatan di bawah standar garis kemiskinan, sehingga ia tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup paling mendasar.

b. Kemiskinan Relatif

Kategori ini mencakup individu yang sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, namun tingkat kesejahtraannya masih dinilai jauh lebih rendah jika disandingkan dengan rata-rata kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

c. Kemiskinan Kultural

Jenis kemiskinan ini muncul akibat faktor sikap atau mentalitas, dimana seseorang atau sekelompok masyarakat enggan berusaha memperbaiki taraf hidupnya karena rasa malas atau pasif, meskipun sebenarnya sudah tersedia bantuan atau peluang dari pihak luar untuk mengubah kondisi tersebut.

2.2.4 Investasi Terbuka

Investasi terbuka merujuk pada keterlibatan suatu negara dalam arus investasi internasional, khususnya melalui penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Dalam teori ekonomi neoklasik, keterbukaan investasi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan akumulasi modal,

memperluas kapasitas produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Aliran investasi asing memungkinkan terjadinya transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan efisiensi manajerial, sehingga produktivitas nasional dapat meningkat. (Borensztein et al., 1998)

Namun, pendekatan strukturalis memandang investasi terbuka secara lebih kritis. Investasi asing tidak selalu memberikan manfaat yang merata apabila struktur ekonomi domestik lemah dan kapasitas institusional terbatas. Dalam kondisi tersebut, investasi terbuka berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi, memperlebar kesenjangan antar sektor, serta menekan industri domestik. Oleh karena itu, peran pemerintah dinilai penting dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh perekonomian nasional (Prebisch, 1959). Secara empiris, tingkat investasi terbuka umumnya diukur melalui rasio penanaman modal asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini mencerminkan sejauh mana suatu negara membuka perekonomiannya terhadap arus modal global. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar keterlibatan negara dalam sistem investasi internasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas makroekonomi. (UNCTAD, 2019)

2.2.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor mendasar dalam pembangunan ekonomi karena berperan ganda sebagai penyedia tenaga kerja sekaligus konsumen dalam perekonomian. Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Malthus, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya, menurunkan pendapatan per kapita, dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dipandang sebagai hambatan bagi pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya dan teknologi (Malthus, 1798)

Namun, pandangan tersebut dikritik oleh teori ekonomi modern yang menilai bahwa jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi ekonomi apabila diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai (Gary & Murphy, 1990). Teori neoklasik dan teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa penduduk berperan sebagai faktor produksi utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja, inovasi, dan akumulasi modal manusia. Dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, pertumbuhan penduduk justru dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar domestik (Solow, 2010)

Pendekatan pembangunan kontemporer menekankan bahwa dampak jumlah penduduk terhadap perekonomian sangat bergantung pada struktur demografi dan kemampuan negara dalam mengelolanya. Fenomena seperti bonus demografi menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif yang besar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jika tersedia lapangan kerja yang cukup. Sebaliknya, jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar justru dapat meningkatkan pengangguran dan beban pembangunan (Todaro & Smith, 2020). Secara empiris, jumlah penduduk umumnya diukur melalui total populasi atau laju pertumbuhan penduduk. Indikator ini digunakan secara luas untuk menganalisis tekanan terhadap pasar tenaga kerja, kebutuhan infrastruktur, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, jumlah penduduk merupakan variabel penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

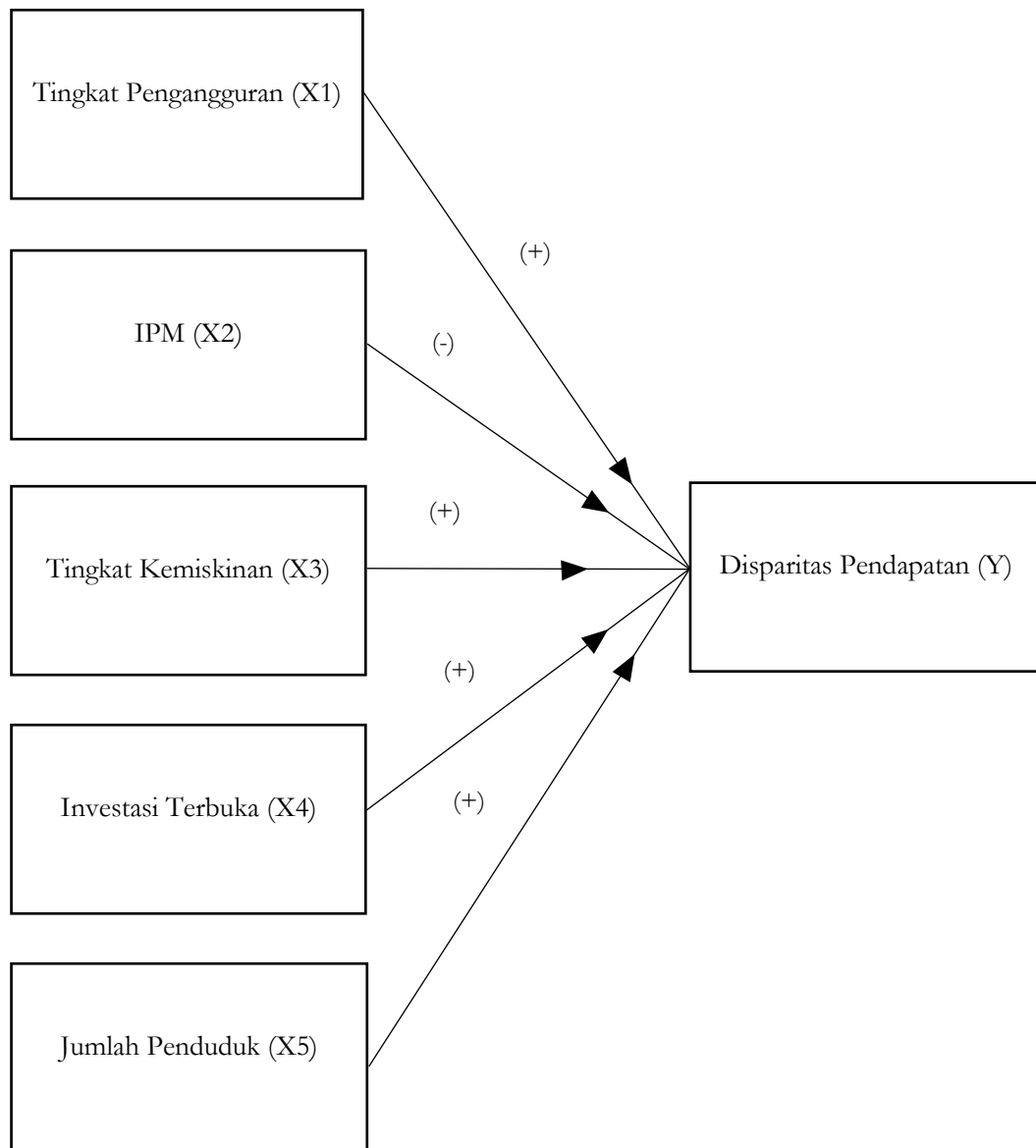
2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah serangkaian dugaan awal yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Model hipotesis ini menjelaskan bentuk hubungan atau pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah uraian mengenai hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Diduga Tingkat pengangguran berpengaruh dan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh dan negatif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
3. Diduga Tingkat Kemiskinan berpengaruh dan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
4. Diduga Investasi terbuka berpengaruh dan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024
5. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh dan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, investasi terbuka, dan jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan rendahnya penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat menjadi terbatas dan berpotensi memperlebar kesenjangan. IPM berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, dimana peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta mengurangi ketimpangan. Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, yang secara langsung berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan. Investasi terbuka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun tanpa pengelolaan yang tepat, manfaatnya tidak selalu terdistribusi secara merata. Sementara itu, jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja, dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan memperparah ketimpangan pendapatan. Analisis hubungan variabel-variabel ini penting untuk memahami dinamika ketimpangan pendapatan di Indonesia.



Gambar 2.4.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan model data panel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2015-2024 dan cross section meliputi 34 provinsi di Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data tingkat pengangguran 34 provinsi di negara Indonesia tahun 2015 – 2024 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
2. Data indeks pembangunan manusia 34 provinsi di negara Indonesia tahun 2015 – 2024 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
3. Data tingkat kemiskinan 34 provinsi di negara Indonesia tahun 2015 – 2024 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
4. Data investasi terbuka 34 provinsi di negara Indonesia tahun 2015 – 2024 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
5. Data jumlah penduduk 34 provinsi di negara Indonesia tahun 2015 – 2024 bersumber dari Badan Pusat Statistik.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) serta variabel terikat (dependen). Dalam susunan penelitian ini, variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat. Dibawah ini adalah pengelompokan kedua variabel tersebut.

3.2.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel yang kondisinya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat disparitas pendapatan pada 34 provinsi di Indonesia periode tahun 2015-2024 yang diukur menggunakan nilai Indeks Gini.

3.2.2 Variabel bebas (Independen)

Variabel independen merupakan variabel yang kondisinya memiliki pengaruh pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran (X1)

Variabel tingkat pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data persentase pengangguran yang tersedia pada masing-masing wilayah provinsi Indonesia, yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

2. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari nilai capaian kualitas hidup masyarakat pada masing-masing provinsi yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

3. Tingkat Kemiskinan (X3)

Variabel tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data persentase penduduk miskin di setiap provinsi yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

4. Investasi Terbuka (X4)

Variabel investasi terbuka yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data realisasi investasi yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

5. Jumlah Penduduk (X5)

Variabel jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data total populasi setiap provinsi di Indonesia yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Model Estimasi Data Panel

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Pendekatan ini menggabungkan data *time series* dengan data *cross section*. (Widarjono, 2005) menjelaskan bahwa terdapat tiga model pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi regresi data panel, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed*

Effect Model, dan *Random Effect Model*. Seluruh proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat olah data Eviews dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 IT_{it} + \beta_5 JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y	: Disparitas Pendapatan
β_0	: Konstan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien regresi
TP	: Tingkat Pengangguran
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TK	: Tingkat Kemiskinan
IT	: Investasi Terbuka
JP	: Jumlah Penduduk
ε	: Error term
i	: Provinsi
t	: Periode

3.3.1.1 Model Common Effect

Common Effect Model merupakan teknik estimasi data panel yang paling mendasar dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Pendekatan ini menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar-individu maupun perubahan waktu (Widarjono, 2005).

3.3.1.2 Model Fixed Effect

Fixed Effect Model adalah teknik estimasi data panel yang menyertakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan nilai intersep dengan asumsi bahwa koefisien regresi tetap konstan. metode ini menerapkan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) guna menjelaskan variasi perbedaan nilai intersep yang muncul (Widarjono, 2005).

3.3.1.3 Model Random Effect

Random Effect Model merupakan model residual yang digunakan untuk menangani ketidakpastian yang sering muncul ketika menggunakan variabel *dummy* pada metode *fixed effect*. Menurut (Widarjono, 2005) pendekatan ini mengestimasi data panel dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa variabel gangguan memiliki keterkaitan, baik antar unit individu maupun antar periode waktu yang berbeda.

3.3.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

(Sriyana, 2014), menjelaskan bahwa terdapat beberapa teknik teoretis yang dapat digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat. Secara teori, jika jumlah periode waktu lebih besar daripada jumlah individu, maka model *fixed effect* lebih disarankan untuk digunakan. Sebaliknya, apabila jumlah periode waktu lebih sedikit dibandingkan jumlah individu, maka model *random effect* dianggap lebih baik.

Namun, pertimbangan berdasarkan perbandingan jumlah data tersebut tidak dapat dijadikan acuan utama karena masih memiliki unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, langkah yang paling akurat adalah dengan melakukan pengujian

statistik secara langsung untuk memilih model terbaik. Terdapat tiga jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM).

3.3.2.1 Uji Chow

Menurut (Sriyana, 2014), uji statistik F digunakan sebagai alat untuk menentukan model yang paling tepat antara *fixed effects* atau *common effects* dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effects*

H_a : Model *fixed effects*

Keputusan untuk menolak H_0 diambil apabila nilai F statistik yang diperoleh lebih besar daripada nilai F tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Jika H_0 ditolak, maka model *fixed effects* dinilai lebih baik untuk digunakan dalam regresi data panel tersebut. Apabila model *fixed effects* terpilih sebagai hasil terbaik, maka langkah selanjutnya adalah melanjutkan analisis dengan melakukan uji Hausman.

3.3.2.2 Uji Hausman

Menurut (Sriyana, 2014), Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pilihan model yang terbaik antara *fixed effects* atau *random effects* dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *random effects*

H_a : Model *fixed effects*

Keputusan untuk menerima H_0 diambil apabila nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritis *chi-square*, atau jika nilai probabilitasnya lebih kecil daripada alpha yang digunakan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka model *random effects* dinilai lebih layak digunakan dibandingkan model *fixed effects*.

3.3.2.3 Uji LM

(Sriyana, 2014) menjelaskan bahwa uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *random effects* atau *common effects*. Metode yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan ini menguji signifikansi *random effects* berdasarkan nilai residual dari model *common effects* dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effects*

H_a : Model *random effects*

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Breusch-Pagan. Jika nilai probabilitas tersebut lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-square*, maka H_0 ditolak. Kondisi ini menunjukkan bahwa model *random effects* lebih tepat untuk digunakan dalam analisis penelitian dibandingkan model *common effects*.

3.3.3 Uji Statistik

3.3.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai koefisien ini berada dalam rentang antara 0 - 1. Menurut (Sriyana, 2014), semakin tinggi nilai koefisien determinasi yang dihasilkan, maka semakin kuat hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.3.3.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen, maka hipotesis disusun sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

Menurut (Widarjono, 2005) pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima, yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.3.3.3 Uji t

Dalam analisis ekonometrika, pengujian hipotesis pada setiap variabel merupakan tahapan yang penting. Uji t diterapkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut (Widarjono, 2005), hasil dari pengujian ini berfungsi sebagai verifikasi apakah hipotesis yang diajukan terbukti benar atau salah secara statistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan variabel dependen yaitu disparitas pendapatan dan variabel independen yang digunakan yaitu Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Investasi Terbuka, dan Jumlah Penduduk. Data penelitian ini berbentuk data panel, yang menggabungkan time series selama 10 tahun dari 2015 hingga 2024 dengan cross section dari 34 provinsi di Indonesia.

Dengan menggunakan estimasi data panel, penelitian ini menguji tiga metode estimasi, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* untuk menentukan model terbaik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelima variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang dipilih.

4.2 Hasil dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel, sehingga perlu melakukan analisis untuk menentukan model terbaik.

4.2.1 Uji Chow

Dalam menentukan model terbaik adalah melakukan uji Chow. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat signifikansi antara model *common effect* dan model *fixed effect* dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_a : Model *fixed effect*

Berikut adalah hasil dari pengujian Uji Chow yang dilakukan:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross - Section F	41.370199	(9.85)	0.0000
Cross - Section Chi - square	168.275790	9	0.0000

Sumber: Lampiran III

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas Cross Section F sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$ ($0.0000 < 0.1$), sehingga keputusan yang diambil dalam Uji Chow ini yaitu menolak H_0 dan menerima H_a . Hasil tersebut menunjukkan bahwa model *fixed effect* merupakan model terbaik dibandingkan model *common effect*.

4.2.2 Uji Hausman

Setelah melakukan tahap Uji Chow untuk menetapkan model *fixed effect* sebagai model terbaik dibandingkan model *common effect*, langkah berikutnya adalah melakukan Uji Hausman. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan model *fixed effect* dengan model *random effect* untuk menentukan model yang paling sesuai dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *random effect*

H_a : Model *fixed effect*

Berikut adalah hasil dari pengujian Uji Hausman yang dilakukan:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.533335	5	0.2577

Sumber: Lampiran IV

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.2577. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$ ($0.2577 > 0.1$), sehingga keputusan yang diambil dalam Uji Hausman yaitu menolak H_a dan menerima H_0 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa model *random effects* merupakan model terbaik dibandingkan model *fixed effect*.

4.2.3 Uji LM

Setelah melakukan tahap Uji Hausman untuk menetapkan model *random effects* sebagai model terbaik dibandingkan model *fixed effect*, langkah berikutnya adalah melakukan Uji LM. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan model *common effect* dengan model *random effect* untuk menentukan model yang paling sesuai, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_a : Model *random effect*

Berikut adalah hasil dari pengujian Uji LM yang dilakukan:

Tabel 3. Hasil Uji LM

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	204.7273 (0.0000)	0.017212 (0.8956)	204.7446 (0.0000)

Sumber: Lampiran V

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$ ($0.0000 < 0.1$), sehingga keputusan yang diambil dalam Uji LM ini yaitu menolak H_0 dan menerima H_a . Hasil tersebut menunjukkan bahwa model *random effects* merupakan model terbaik dibandingkan model *common effect*.

4.3 Model Terbaik (*Random Effect Model*)

Setelah melakukan pengujian model terbaik antara model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam estimasi ini adalah model *random effect*. Berikut hasil estimasi dari model *random effect*:

Tabel 4. *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std.error	t - statistic	Prob.
C	0.562345	0.079035	7.115169	0.0000
PENGANGGURAN	0.000687	0.001346	0.510302	0.6110
IPM	-0.003783	0.000965	-3.921540	0.0002
KEMISKINAN	0.003085	0.001645	1.875801	0.0638
INVESTASI	-1.61E-08	1.92E-08	-0.838349	0.4040
PENDUDUK	3.70E-09	1.90E-07	0.019524	0.9845
R - squared	0.477494	Mean dependent var	0.045293	
Adj. R – squared	0.449701	S.D. depent var	0.014725	
S.E of regression	0.010923	Sum squared resid	0.011216	
F-statistic	17.18042	Durbin Watson stat	0.011216	
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber: VI

Penelitian ini menggunakan pengolahan data panel yang telah melalui pengujian Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM. Berdasarkan hasil dari ketiga pengujian tersebut, model *Random Effect* terpilih sebagai model terbaik untuk digunakan, yang kemudian dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$\text{GINI} = 0.56234534809 + 0.000686643051484\text{PENGANGGURAN} - 0.00378255471439\text{IPM} + 0.00308502887198\text{KEMISKINAN} - 1.60770620915\text{e-}08\text{INVESTASI} + 3.70059777698\text{e-}09\text{PENDUDUK} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

GINI	: Disparitas Pendapatan (%)
PENGANGGURAN	: Tingkat Pengangguran (%)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (%)
KEMISKINAN	: Tingkat Kemiskinan (%)
INVESTASI	: Investasi Terbuka (juta)
PENDUDUK	: Jumlah Penduduk (jiwa)
ε	: Error term
i	: Provinsi
t	: Periode

Berdasarkan hasil dari estimasi dan persamaan random effect model diatas menunjukkan:

1. Variabel pengangguran memiliki hubungan positif terhadap disparitas pendapatan dengan nilai koefisien 0.000687 dan nilai probabilitas $0.6110 > \alpha = 10\%$ sehingga variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.

2. Variabel IPM memiliki hubungan negatif terhadap disparitas pendapatan dengan nilai koefisien -0.003783 dan nilai probabilitas $0.0002 < \alpha = 10\%$ sehingga variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.
3. Variabel Kemiskinan memiliki hubungan negatif terhadap disparitas pendapatan dengan nilai koefisien 0.003085 dan nilai probabilitas $0.0638 < \alpha = 10\%$ sehingga variabel Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.
4. Variabel Investasi memiliki hubungan negatif terhadap disparitas pendapatan dengan nilai koefisien -0.0000000161 dan nilai probabilitas $0.4040 > \alpha = 10\%$ maka variabel Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.
5. Variabel Penduduk memiliki hubungan positif terhadap disparitas pendapatan dengan nilai koefisien 0.0000000037 dan nilai probabilitas $0.9845 > \alpha = 10\%$ maka variabel Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.

4.4 Uji Statistik

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai R-Squared sebesar 0.477494 atau 47.7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengangguran, IPM, Kemiskinan, Investasi, dan Jumlah Penduduk dapat menjelaskan variasi disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia sebesar 47.7%. Sementara itu, sisanya sebesar 52.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

4.4.2 Uji F

Uji F diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai probabilitas F - statistic dengan nilai signifikansi $\alpha = 10\%$. Hal ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama - sama mampu mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi tabel 3 diperoleh nilai F - statistic sebesar $17.18042 > 10\%$ sehingga gagal menolak H_0 , yang dapat dinyatakan bahwa variabel

Pengangguran, IPM, Kemiskinan, Investasi, dan Jumlah Penduduk secara bersama - sama tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan.

4.4. Uji t

Tabel 4. Uji t

Variable	Coefficient	t - statistic	Prob.	Signifikansi
C	0.562345	7.115169	0.0000	
PENGANGGURAN	0.000687	0.510302	0.6110	Tidak Signifikan
IPM	-0.003783	-3.921540	0.0002	Signifikan
KEMISKINAN	0.003085	1.875801	0.0638	Signifikan
INVESTASI	-1.61E-08	-0.838349	0.4040	Tidak Signifikan
PENDUDUK	3.70E-09	0.019524	0.9845	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran VII

Tabel di atas menunjukkan hasil uji t yang digunakan untuk melihat hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Dalam pengujian ini, variabel independen dinyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 10\%$. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 10\%$, maka variabel tersebut dinyatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah rincian hasil uji t berdasarkan estimasi model random effect:

1. Variabel Pengangguran:

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel tersebut, diperoleh nilai koefisien sebesar 0.000687 dengan tingkat probabilitas $0.6110 > \alpha = 10\%$, maka gagal menolak H_0 . Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengangguran secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

2. Variabel IPM:

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel tersebut, diperoleh nilai koefisien sebesar -0.003783 dengan tingkat probabilitas $0.0002 < \alpha = 10\%$, maka menolak H_0 . Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel IPM secara individu berpengaruh signifikan negatif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

3. Variabel Kemiskinan:

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel tersebut, diperoleh nilai koefisien sebesar 0.003085 dengan tingkat probabilitas $0.0638 < \alpha = 10\%$, maka gagal menolak H_0 . Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Kemiskinan secara individu berpengaruh signifikan negatif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

4. Variabel Investasi:

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel tersebut, diperoleh nilai koefisien sebesar -0.0000000161 dengan tingkat probabilitas $0.4040 > \alpha = 10\%$, maka gagal menolak H_0 . Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Investasi secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

5. Variabel Jumlah Penduduk:

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel tersebut, diperoleh nilai koefisien sebesar 0.0000000037 dengan tingkat probabilitas $0.9845 > \alpha = 10\%$,

maka gagal menolak H_0 . Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Variabel Pengangguran Terhadap Disparitas Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model, variabel pengangguran menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.000687 dengan nilai probabilitas sebesar $0.6110 > \alpha = 10\%$ sehingga gagal menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pengangguran memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ashari et al., 2024), yang menggunakan data panel 34 provinsi periode 2019-2023 dan menemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan pengangguran tidak selalu berdampak langsung pada disparitas pendapatan, karena adanya faktor lain seperti program bantuan sosial, sektor informal yang menyerap tenaga kerja, serta distribusi pendapatan yang relatif merata di kelompok bawah. Oleh karena itu, pengangguran tidak secara langsung menjadi determinan utama dalam menjelaskan disparitas pendapatan di provinsi Indonesia.

4.5.2 Pengaruh Variabel IPM Terhadap Disparitas Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi model, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menghasilkan nilai koefisien sebesar -0.003783 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0002 < \alpha = 10\%$, sehingga menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM secara individu berpengaruh signifikan negatif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi di Indonesia. Setiap peningkatan IPM sebesar 1% akan menurunkan disparitas pendapatan sebesar 0.37%, yang menunjukkan bahwa

peningkatan kualitas pembangunan manusia mampu mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap disparitas pendapatan. Temuan ini didukung oleh penelitian (Ardiani & Prabowo, 2024) yang menyebutkan bahwa secara parsial, variabel IPM memiliki pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi di Indonesia pada periode 2018–2022. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan IPM yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang lebih produktif dan menghasilkan lebih tinggi. Di Indonesia, provinsi dengan IPM tinggi seperti DKI Jakarta dan DIY cenderung memiliki akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga distribusi pendapatan menjadi relatif lebih merata dibandingkan daerah dengan IPM rendah. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi faktor penting dalam menekan disparitas pendapatan, karena mampu mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

4.5.3 Pengaruh Variabel Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi model, variabel kemiskinan menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.003085 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0638 < \alpha = 10\%$, sehingga menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan secara individu memiliki hubungan positif namun berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia. Setiap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan disparitas pendapatan sebesar 0.30%, yang menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan mampu mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap disparitas pendapatan. Temuan ini didukung oleh penelitian (Karimi et al., 2023) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap disparitas pendapatan di Indonesia. Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan tidak selalu secara langsung memperlebar disparitas pendapatan, Hal ini terjadi karena program perlindungan sosial pemerintah seperti bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat telah disalurkan secara lebih merata antar provinsi, sehingga mencegah pemusatan kemiskinan pada satu wilayah tertentu. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi variabel signifikan dengan pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

4.5.4 Pengaruh Variabel Investasi Terhadap Disparitas Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi model, variabel investasi menghasilkan nilai koefisien sebesar -0.0000000161 dengan nilai probabilitas sebesar $0.4040 > \alpha = 5\%$, sehingga gagal menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi secara individu memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa investasi memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Amirullah et al., 2025) yang menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia. Secara empiris, kondisi ini dapat dijelaskan bahwa investasi yang masuk, baik domestik maupun asing, cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu dan wilayah tertentu seperti Pulau Jawa, sehingga manfaatnya tidak tersebar secara merata ke seluruh daerah. Selain itu, investasi seringkali lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan keterampilan dan modal yang lebih tinggi, sementara kelompok berpendapatan rendah tidak secara langsung merasakan dampaknya. faktor lain seperti kualitas institusi, pemerataan pembangunan, serta kesiapan tenaga kerja juga mempengaruhi sejauh mana investasi dapat berkontribusi terhadap distribusi pendapatan. Oleh karena itu, investasi tidak secara langsung menjadi determinan utama dalam menjelaskan disparitas pendapatan di Indonesia

tanpa didukung oleh kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat investasi secara inklusif.

4.5.5 Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi model, variabel jumlah penduduk menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.0000000037 dengan nilai probabilitas sebesar $0.9845 > \alpha = 5\%$, sehingga gagal menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk secara individu memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan. Namun, temuan ini tidak sesuai dengan penelitian (Susi, 2025) yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi periode penelitian, metode analisis, maupun karakteristik wilayah yang diteliti. Secara empiris, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu memperlebar disparitas, karena pertumbuhan penduduk seringkali terjadi secara merata pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti pemerataan pembangunan, program keluarga berencana, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan turut berperan dalam mengurangi dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap distribusi pendapatan. Oleh karena itu, jumlah penduduk tidak secara langsung menjadi determinan utama dalam menjelaskan disparitas pendapatan, melainkan bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis lima variabel yang telah dibahas sebelumnya terkait pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Investasi, dan Jumlah Penduduk terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia selama periode 2015 - 2024 dapat disimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan, namun memiliki hubungan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran tidak secara langsung memperlebar disparitas pendapatan. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa sebagian tenaga kerja yang menganggur masih dapat terserap ke dalam sektor informal serta didukung oleh adanya program bantuan sosial pemerintah, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi tidak signifikan. Dengan demikian, pengangguran tidak serta-merta menjadi faktor utama yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Indonesia.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM mampu menurunkan tingkat disparitas pendapatan. Kondisi ini diasumsikan karena peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat dapat memperluas akses terhadap peluang ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, IPM menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pendapatan, karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah.
3. Variabel kemiskinan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia yang diteliti. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan secara langsung dapat memperlebar disparitas pendapatan. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar penduduk miskin berada pada kelompok berpendapatan rendah yang relatif homogen, namun tidak adanya intervensi perlindungan sosial yang cukup merata antar provinsi menyebabkan kemiskinan terakumulasi pada wilayah tertentu sehingga memperlebar kesenjangan regional. Dengan demikian, kemiskinan menjadi faktor utama yang mempengaruhi distribusi pendapatan secara signifikan di Indonesia.

4. Variabel investasi tidak berpengaruh signifikan, namun memiliki hubungan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi tidak secara langsung mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan. Kondisi ini diasumsikan karena investasi cenderung terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu serta lebih banyak menguntungkan kelompok masyarakat dengan keterampilan dan modal tinggi, sehingga manfaatnya tidak merata. Oleh karena itu, investasi tidak serta-merta mampu mengubah distribusi pendapatan secara signifikan tanpa didukung kebijakan pemerataan yang inklusif.
5. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan, namun memiliki hubungan positif terhadap disparitas pendapatan di 34 provinsi Indonesia yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak secara langsung memperlebar disparitas pendapatan. Kondisi ini diasumsikan karena pertumbuhan penduduk cenderung terjadi pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah serta didukung oleh kebijakan pemerintah seperti pemerataan pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar. Oleh karena itu, jumlah penduduk tidak serta-merta mempengaruhi distribusi pendapatan secara signifikan tanpa diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kebijakan pembangunan.

5.2 Implikasi

1. Berdasarkan penelitian bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan, meskipun memiliki hubungan positif, mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran tidak secara langsung memperlebar ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan seperti sektor informal dan program bantuan sosial yang mampu meredam dampak negatif pengangguran terhadap distribusi pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya perlu berfokus pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan, perluasan kesempatan kerja formal, serta penguatan perlindungan sosial agar dampak pengangguran terhadap kesejahteraan dan ketimpangan dapat diturunkan secara efektif.
2. Berdasarkan penelitian bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia mampu menjadi instrumen efektif dalam menekan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peningkatan IPM yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata, terutama di daerah dengan IPM rendah, melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta program peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, upaya peningkatan IPM tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan inklusif.
3. Berdasarkan penelitian bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap disparitas pendapatan, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemiskinan secara langsung dapat memperlebar ketimpangan pendapatan di Indonesia. Adanya dukungan

seperti program perlindungan sosial, subsidi, serta distribusi pendapatan yang relatif homogen pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah tidak selalu dapat menahan pelebaran kesenjangan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya perlu berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga dampak kemiskinan terhadap disparitas pendapatan dapat dikurangi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Berdasarkan penelitian bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan, meskipun memiliki hubungan positif, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi belum mampu memberikan dampak langsung terhadap pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Manfaat investasi masih cenderung terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu serta lebih banyak dinikmati oleh kelompok dengan modal dan keterampilan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan investasi perlu diarahkan secara lebih inklusif dengan mendorong pemerataan investasi antar daerah, memperkuat kualitas institusi, serta meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas dan mampu mengurangi disparitas pendapatan.
5. Berdasarkan penelitian bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan, meskipun memiliki hubungan positif, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak secara langsung memperlebar ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang relatif merata serta adanya kebijakan pemerintah seperti pemerataan pembangunan, program keluarga berencana, dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan mampu menahan dampak negatif terhadap distribusi pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan perlu lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan antar wilayah agar pertumbuhan penduduk dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pemerataan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affif, D. H. M. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA. *Diponegoro Journal of Economics*, 11, 176–186.
- Alisjahbana, P. D. A. S. (2012). Regional Development and Finances : *IRSA*, 10.
- Amirullah, M. A. K., Ghannili, F., Utama, M. B., & Wau, T. (2025). An Analysis of Post-Reform Income Inequality in Indonesia: Does Institutional Quality Matter? *Malik. JIE*, 09(01), 85–103.
- Anand, & Sen. (1994). *Human Development Index: Methodology and measurement*. UNDP. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:98d15918-dca9-4df1-8653-60df6d0289dd>
- Ardiani, D. R., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *JOE*, 4, 52–62.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. https://books.google.co.id/books/about/Ekonomi_pembangunan.html?id=87rwHAAACAAJ&redir_esc=y
- Ashari, N. R., Gunawan, S., W, I., & Nilawati. (2024). Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *JIKSS*, 13. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139>
- Astary, R., Safitri, N., Zarpani, & Harahap, E. F. (2024). PENGARUH INVESTASI , PENGELUARAN PEMERINTAH , UPAH MINIMUM. *Menara Ekonomi*, X(1), 106–115.
- Asykurunnizza, A. Z., Adyistia, R. Della, Oktavia, S., Febriani, G., & Hadi, M. A. (2025). Determinasi Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi di Indonesia : Analisis Panel dengan Pendekatan Fixed Effect Model (2019-2023) Determination of Income Inequality Between Provinces in Indonesia : Panel Analysis with a Fixed Effect Model Approach (2019. *jurnal.umsu*, 25(1), 182–201.
- Borensztein, E., Gregorio, J. De, & Lee, J. (1998). *How does foreign direct investment affect economic*. 45, 115–135.
- Borjas, G. J. (2024). *Labor Economics*. 2020, 59–66.
- BPS. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Djojohadikusumo, S. (1995). *Perkembangan pemikiran ekonomi dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*. LP3ES. <https://library.stikptik.ac.id/detail?id=43252&loaksi=lokal>

- Dwira, E. P., & Maulana, H. (2023). PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *DINUS INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE*, 1(1), 49–55.
- Fibriani, M. (2025). THE INFLUENCE OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND GINI. *MJIFM*, 5(2), 2976–2984.
- Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab / Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022 Abstrak. *PRIMANOMICS*, 21(3), 1–8.
- Gary, S., & Murphy, K. M. (1990). *Human Capital , Fertility , and Economic Growth Robert Tamura*. 98(3).
- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *JEL*, 8(3), 250–265.
- HM, H. S. (2011). PERHITUNGAN INDEKS GINI RATIO DAN ANALISIS KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2006-2010 Halaman Tulisan Jurnal (Isi / Materi Jurnal). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4).
- Imaniah, S., Madnasir, & Supriyaningsih, O. (2024). ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM. *IJEN*, 02(02), 459–469.
- Karimi, K., Mulyani, P., Murialti, N., & Tibrani. (2023). *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. 13(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4775>
- Khairunnisa*, M. (2024). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH ANTAR PROVINSI (STUDI KASUS PULAU JAWA TAHUN 2014-2023). *JDESS*, 3(3), 898–911.
- Laili Nurhasanah*, M. (2024). Pemicu Ketimpangan Pendapatan di Regional Kalimantan Tahun 2015-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 7(1), 31–40.
- Lania, Y., Canon, S., & Payu, B. R. (2025). ANALISIS KETIMPANGAN REGIONAL ANTAR PROVINSI DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Yetlina. *Jurnal P4I*, 5(2), 265–273.
- M.Anas, Riani, L. P., & Lianawati, D. (2019). *POTRET KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2018 DENGAN INDIKATOR RASIO GINI , KURVA LORENTZ , DAN UKURAN BANK DUNIA*. 72–83.
- Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*.
- Mangundap1, V. H., Kumenaung2, A. G., & Siwu3, H. F. D. (2024). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN PENGELUARA

N PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN MINAHASA, KOTA TOMOHON DAN KOTA MANADO. *JBIE*, 24(2), 25–36.

Mankiw, N. G., Ghent, L., Mankiw, N. G., Ghent, L. S., Calhoun, J. W., Tufts, J., Baker, J. E., Joyner, B., True, V., Cowden, D., Schaffer, K., Berger, E., & Kunkler, M. (2021). *Instructor 's Manual with Solutions Manual Principles of Macroeconomics FOURTH EDITION Prepared by.*

Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2015). KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BOJONEGORO. *agro ekonomi*, 26(2), 115–120.

Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–7.

Ocsa, A. R., Kornita, S. E., & Hamidi, W. (2025). ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3895–3901.

Phelps, E. s. (1994). *Structural Slumps*.[https://books.google.co.id/books?id=5_VOmYA4HF4C&pg=PR7&ots=9Xtslc1TBo&dq=Structural SlumpsPhelps&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=5_VOmYA4HF4C&pg=PR7&ots=9Xtslc1TBo&dq=Structural+Slumps+Phelps&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false)

Prebisch, R. (1959). *Commercial policy in the underdeveloped countries*.<https://www.sidalc.net/search/Record/dig-cepal-11362-32861/Description>

Putri, E. L., Saefurrohman, G. U., & Pratomo, D. (2025). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(7), 2403–2426. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.8260>

Rambey, M. J. (2018). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA. *JED*, 4(1), 32–36.

Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). *Economic growth and human development*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X99001068>

Solow, R. (2010). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *JSTOR*, 70(1), 65–94.

Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia)*.

Susi.(2025). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN PENGUKURAN INDEKS GINI RATIO PADA EMPAT NEGARA ISLAM. *JMI*, 772–783.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*.
- UNCTAD. (2019). *World investment report*.
- UNDP. (2020). *Human Development Report*. <https://hdr.undp.org/>
- Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI ACEH. *JERU*, 05(1), 39–47.
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Ekonisia. <https://www.scribd.com/document/434621423/EKONOMETRIKA-TEORI-DAN-APLIKASI-pdf>
- Wordbank. (2024). *Indeks Gini*. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2024&locations=ID&start=2015&view=chart>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Pengaruh pertumbuhan ekonomi , IPM , dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *JKIEK*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9>

LAMPIRAN I

Tabel Data

No	Provinsi	Tahun	Gini Rasio (%)	Tingkat Pengangguran (%)	IPM (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Investasi (juta)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Aceh	2015	0.34	9.93	69.45	17.08	41924	50187
2	Aceh	2016	0.34	7.57	70.00	16.73	24561	50945
3	Aceh	2017	0.33	6.57	70.60	16.89	7198	51694
4	Aceh	2018	0.32	6.34	71.19	15.97	970	52434
5	Aceh	2019	0.32	6.17	71.90	15.32	36069	53163
6	Aceh	2020	0.32	6.59	73.29	14.99	82411	53881
7	Aceh	2021	0.32	6.30	73.48	15.33	79047	53337
8	Aceh	2022	0.29	6.17	74.11	14.64	44242	54079
9	Aceh	2023	0.30	6.03	74.70	14.45	88833	54825
10	Aceh	2024	0.29	5.75	74.03	14.23	83170	55548
11	Sumatera Utara	2015	0.33	6.71	69.51	10.53	42874	139614
12	Sumatera Utara	2016	0.31	5.84	70.00	10.35	48642	141368
13	Sumatera Utara	2017	0.34	5.60	70.57	10.22	116836	143084
14	Sumatera Utara	2018	0.31	5.55	71.18	9.22	83718	144760
15	Sumatera Utara	2019	0.32	5.39	71.74	8.83	197490	146394
16	Sumatera Utara	2020	0.31	6.91	73.62	8.75	181895	147984
17	Sumatera Utara	2021	0.31	6.33	73.84	9.01	184845	149362
18	Sumatera Utara	2022	0.33	6.16	74.51	8.42	227892	151152
19	Sumatera Utara	2023	0.31	5.89	75.13	8.15	215740	153866
20	Sumatera Utara	2024	0.31	5.60	74.02	7.99	224457	155885
21	Sumatera Barat	2015	0.32	6.89	69.98	7.31	15525	52009
22	Sumatera Barat	2016	0.31	5.09	70.73	7.09	37956	52725
23	Sumatera Barat	2017	0.31	5.58	71.24	6.87	15170	53428
24	Sumatera Barat	2018	0.31	5.66	71.73	6.65	23094	54118
25	Sumatera Barat	2019	0.31	5.38	72.39	6.42	30266	54795
26	Sumatera Barat	2020	0.30	6.88	74.29	6.28	31062	55457
27	Sumatera Barat	2021	0.30	6.52	74.56	6.63	41837	55802
28	Sumatera Barat	2022	0.29	6.28	75.16	5.92	25598	56406
29	Sumatera Barat	2023	0.28	5.94	75.64	5.95	44882	57572
30	Sumatera Barat	2024	0.29	5.75	74.49	5.97	79563	58362
31	Riau	2015	0.37	7.83	70.84	8.42	99430	63567
32	Riau	2016	0.35	7.43	71.20	7.98	66137	64784
33	Riau	2017	0.33	6.22	71.79	7.78	108298	65987

34	Riau	2018	0.35	5.98	72.44	7.39	90564	67176
35	Riau	2019	0.33	5.76	73.00	7.08	262922	68351
36	Riau	2020	0.32	6.32	73.67	6.82	341178	69512
37	Riau	2021	0.33	4.42	73.89	7.12	249978	64936
38	Riau	2022	0.32	4.37	74.45	6.78	430620	66144
39	Riau	2023	0.32	4.23	74.95	6.68	482433	66429
40	Riau	2024	0.31	3.70	74.79	6.67	610976	67281
41	Jambi	2015	0.34	4.34	68.89	8.86	35402	34039
42	Jambi	2016	0.35	4.00	69.62	8.41	38844	34459
43	Jambi	2017	0.33	3.87	69.99	8.19	30066	34870
44	Jambi	2018	0.34	3.73	70.65	7.92	28765	35271
45	Jambi	2019	0.32	4.06	71.26	7.60	44374	35662
46	Jambi	2020	0.32	5.13	72.29	7.58	35117	36042
47	Jambi	2021	0.32	5.09	72.62	8.09	62042	35851
48	Jambi	2022	0.34	4.59	73.11	7.62	88827	36311
49	Jambi	2023	0.34	4.53	73.73	7.58	89390	36792
50	Jambi	2024	0.32	4.48	73.43	7.10	99862	37243
51	Sumatera Selatan	2015	0.33	6.07	67.46	14.25	109441	80627
52	Sumatera Selatan	2016	0.36	4.31	68.24	13.54	85341	81741
53	Sumatera Selatan	2017	0.37	4.39	68.86	13.19	82002	82838
54	Sumatera Selatan	2018	0.34	4.27	69.39	12.80	95198	83915
55	Sumatera Selatan	2019	0.34	4.53	70.02	12.71	169211	84972
56	Sumatera Selatan	2020	0.34	5.51	71.62	12.66	158245	86008
57	Sumatera Selatan	2021	0.34	4.98	71.83	12.84	162669	85509
58	Sumatera Selatan	2022	0.33	4.63	72.48	11.90	235260	86570
59	Sumatera Selatan	2023	0.34	4.11	73.18	11.78	256024	87435
60	Sumatera Selatan	2024	0.33	4.48	72.30	10.97	366714	88373
61	Bengkulu	2015	0.37	4.91	68.59	17.88	5539	18759
62	Bengkulu	2016	0.35	3.30	69.33	17.32	9491	19007
63	Bengkulu	2017	0.35	3.74	69.95	16.45	2965	19249
64	Bengkulu	2018	0.36	3.35	70.64	15.43	49028	19486
65	Bengkulu	2019	0.33	3.26	71.21	15.23	54581	19718
66	Bengkulu	2020	0.32	4.07	72.93	15.03	53992	19943
67	Bengkulu	2021	0.32	3.65	73.16	15.22	49235	20329
68	Bengkulu	2022	0.32	3.59	73.68	14.62	69573	20601
69	Bengkulu	2023	0.33	3.42	74.30	14.04	72187	20860
70	Bengkulu	2024	0.34	3.86	73.39	13.56	79825	21122
71	Lampung	2015	0.35	5.14	66.95	14.35	11023	81230

72	Lampung	2016	0.36	4.62	67.65	14.29	60318	82103
73	Lampung	2017	0.33	4.33	68.25	13.69	70148	82953
74	Lampung	2018	0.33	4.04	69.02	13.14	123147	83777
75	Lampung	2019	0.33	4.03	69.57	12.62	24289	84576
76	Lampung	2020	0.32	4.67	71.04	12.34	71205	85348
77	Lampung	2021	0.31	4.69	71.25	12.62	105132	90818
78	Lampung	2022	0.31	4.52	71.79	11.57	58092	91766
79	Lampung	2023	0.32	4.23	72.48	11.11	76258	93140
80	Lampung	2024	0.30	4.19	71.81	10.69	72181	94196
81	Bangka Belitung	2015	0.28	6.29	69.05	5.40	10237	13733
82	Bangka Belitung	2016	0.29	2.60	69.55	5.22	22020	13931
83	Bangka Belitung	2017	0.28	3.78	69.99	5.20	17347	14127
84	Bangka Belitung	2018	0.27	3.61	70.67	5.25	31129	14321
85	Bangka Belitung	2019	0.26	3.58	71.30	4.62	29152	14511
86	Bangka Belitung	2020	0.26	5.25	72.74	4.53	18638	14698
87	Bangka Belitung	2021	0.25	5.03	72.96	4.90	36774	14732
88	Bangka Belitung	2022	0.26	4.77	73.50	4.45	63090	14946
89	Bangka Belitung	2023	0.25	4.56	74.09	4.52	79614	15119
90	Bangka Belitung	2024	0.24	4.63	73.33	4.55	157248	15315
91	Kepulauan Riau	2015	0.34	6.20	73.75	6.24	6121	19828
92	Kepulauan Riau	2016	0.35	7.69	73.99	5.98	4925	20453
93	Kepulauan Riau	2017	0.36	7.16	74.45	6.06	13980	21094
94	Kepulauan Riau	2018	0.34	8.04	74.84	6.20	43860	21748
95	Kepulauan Riau	2019	0.34	7.50	75.48	5.90	56564	22416
96	Kepulauan Riau	2020	0.33	10.34	77.69	5.92	142490	23095
97	Kepulauan Riau	2021	0.34	9.91	77.87	6.12	97687	21182
98	Kepulauan Riau	2022	0.33	8.23	78.48	6.24	48174	21798
99	Kepulauan Riau	2023	0.34	6.80	79.08	5.69	88566	21526
100	Kepulauan Riau	2024	0.36	6.39	77.97	5.37	100174	21833
101	DKI Jakarta	2015	0.42	7.23	78.99	3.93	155127	101790
102	DKI Jakarta	2016	0.40	6.12	79.60	3.75	122169	102653
103	DKI Jakarta	2017	0.41	7.14	80.06	3.77	472623	103483
104	DKI Jakarta	2018	0.39	6.65	80.47	3.57	490974	104280
105	DKI Jakarta	2019	0.39	6.54	80.76	3.47	620948	105041
106	DKI Jakarta	2020	0.40	10.95	81.92	4.53	429547	105764
107	DKI Jakarta	2021	0.41	8.50	82.25	4.72	547082	106097
108	DKI Jakarta	2022	0.41	7.18	82.77	4.69	892236	106800
109	DKI Jakarta	2023	0.43	6.53	83.55	4.44	952021	106721

110	DKI Jakarta	2024	0.43	6.21	83.08	4.30	1284021	106849
111	Jawa Barat	2015	0.43	8.72	69.50	9.53	262729	468052
112	Jawa Barat	2016	0.40	8.89	70.05	8.95	303602	473658
113	Jawa Barat	2017	0.39	8.22	70.69	8.71	383906	479228
114	Jawa Barat	2018	0.41	8.23	71.30	7.45	422782	484755
115	Jawa Barat	2019	0.40	8.04	72.03	6.91	492842	490232
116	Jawa Barat	2020	0.40	10.46	72.61	7.88	514005	495652
117	Jawa Barat	2021	0.41	9.82	72.96	8.40	599485	487824
118	Jawa Barat	2022	0.41	8.31	73.63	8.06	808083	494058
119	Jawa Barat	2023	0.43	7.44	74.24	7.62	880129	498603
120	Jawa Barat	2024	0.43	6.75	74.43	7.46	1015521	503452
121	Jawa Tengah	2015	0.38	4.99	69.49	13.58	154107	337289
122	Jawa Tengah	2016	0.36	4.63	69.98	13.27	240704	339464
123	Jawa Tengah	2017	0.37	4.57	70.52	13.01	198660	341564
124	Jawa Tengah	2018	0.36	4.47	71.12	11.32	274749	343585
125	Jawa Tengah	2019	0.36	4.44	71.73	10.80	186547	345525
126	Jawa Tengah	2020	0.36	6.48	71.88	11.41	306061	347382
127	Jawa Tengah	2021	0.37	5.95	72.17	11.79	313112	367425
128	Jawa Tengah	2022	0.37	5.57	72.80	10.93	249923	370324
129	Jawa Tengah	2023	0.37	5.13	73.39	10.77	329872	375410
130	Jawa Tengah	2024	0.36	4.78	73.88	10.47	332987	378923
131	DIY	2015	0.42	4.07	77.59	14.91	3624	36692
132	DIY	2016	0.43	2.72	78.38	13.34	9486	37185
133	DIY	2017	0.44	3.02	78.89	13.02	2946	37682
134	DIY	2018	0.42	3.37	79.53	12.13	61317	38183
135	DIY	2019	0.43	3.18	79.99	11.70	62988	38686
136	DIY	2020	0.44	4.57	79.95	12.28	26834	39192
137	DIY	2021	0.44	4.56	80.22	12.80	27613	37129
138	DIY	2022	0.46	4.06	80.65	11.34	22750	37619
139	DIY	2023	0.45	3.69	81.09	11.04	50155	37365
140	DIY	2024	0.43	3.48	81.55	10.83	36303	37595
141	Jawa Timur	2015	0.40	4.47	68.95	12.34	354898	387843
142	Jawa Timur	2016	0.40	4.21	69.74	12.05	463316	390414
143	Jawa Timur	2017	0.42	4.00	70.27	11.77	450445	392873
144	Jawa Timur	2018	0.37	3.91	70.77	10.98	333331	395219
145	Jawa Timur	2019	0.36	3.82	71.50	10.37	454527	397448
146	Jawa Timur	2020	0.36	5.84	73.04	11.09	556606	399559
147	Jawa Timur	2021	0.36	5.74	73.48	11.40	525522	408788

148	Jawa Timur	2022	0.37	5.49	74.05	10.38	653559	411500
149	Jawa Timur	2023	0.39	4.88	74.65	10.35	749374	415279
150	Jawa Timur	2024	0.37	4.19	74.09	9.79	924101	418145
151	Banten	2015	0.39	9.55	70.27	5.90	107099	119676
152	Banten	2016	0.39	8.92	70.96	5.42	124263	121572
153	Banten	2017	0.38	9.28	71.42	5.45	151419	123450
154	Banten	2018	0.37	8.47	71.95	5.24	186376	125308
155	Banten	2019	0.36	8.11	72.44	5.09	207084	127143
156	Banten	2020	0.37	10.64	74.41	5.92	311457	128953
157	Banten	2021	0.36	8.98	74.68	6.66	259895	120615
158	Banten	2022	0.38	8.09	75.25	6.16	312839	122520
159	Banten	2023	0.37	7.52	75.77	6.17	379717	123077
160	Banten	2024	0.36	6.68	74.48	5.84	476058	124314
161	Bali	2015	0.40	1.99	73.27	4.74	12504	41484
162	Bali	2016	0.37	1.89	73.65	4.25	4823	42024
163	Bali	2017	0.38	1.48	74.30	4.25	5925	42560
164	Bali	2018	0.36	1.40	74.77	4.01	15488	43092
165	Bali	2019	0.37	1.57	75.38	3.79	73932	43620
166	Bali	2020	0.37	5.63	76.52	3.78	54327	44144
167	Bali	2021	0.38	5.37	76.69	4.53	63552	43627
168	Bali	2022	0.36	4.80	77.40	4.57	60021	44151
169	Bali	2023	0.36	2.69	78.01	4.25	69508	44043
170	Bali	2024	0.35	1.79	77.76	4.00	123123	44333
171	NTB	2015	0.36	5.69	65.19	17.10	3478	48467
172	NTB	2016	0.37	3.94	65.81	16.48	13428	49248
173	NTB	2017	0.38	3.32	66.58	16.07	54135	50018
174	NTB	2018	0.39	3.58	67.30	14.75	41351	50777
175	NTB	2019	0.37	3.28	68.14	14.56	35190	51524
176	NTB	2020	0.39	4.22	70.46	13.97	65824	52259
177	NTB	2021	0.38	3.01	70.86	14.14	90905	53900
178	NTB	2022	0.37	2.89	71.65	13.68	110315	54737
179	NTB	2023	0.38	2.80	72.37	13.85	307662	55603
180	NTB	2024	0.36	2.73	70.93	12.91	433850	56460
181	NTT	2015	0.35	3.83	62.67	22.61	12957	51261
182	NTT	2016	0.36	3.25	63.13	22.19	8222	52047
183	NTT	2017	0.36	3.27	63.73	21.85	10819	52828
184	NTT	2018	0.36	2.28	64.39	21.35	42461	53603
185	NTT	2019	0.36	3.14	65.23	21.09	37526	54372

186	NTT	2020	0.36	4.28	66.93	20.90	30285	55134
187	NTT	2021	0.34	3.77	67.02	20.99	37426	53877
188	NTT	2022	0.34	3.54	67.63	20.05	34593	54663
189	NTT	2023	0.33	3.14	68.40	19.96	34072	55691
190	NTT	2024	0.32	3.02	67.39	19.48	26255	56560
191	Kalimantan Barat	2015	0.33	5.15	65.19	8.03	61435	47955
192	Kalimantan Barat	2016	0.33	4.23	65.88	7.87	90155	48599
193	Kalimantan Barat	2017	0.33	4.36	66.26	7.88	123809	49231
194	Kalimantan Barat	2018	0.33	4.18	66.98	7.77	65914	49851
195	Kalimantan Barat	2019	0.32	4.35	67.65	7.49	76991	50457
196	Kalimantan Barat	2020	0.33	5.81	68.76	7.17	92565	51049
197	Kalimantan Barat	2021	0.32	5.82	68.99	7.15	107734	54708
198	Kalimantan Barat	2022	0.31	5.11	69.71	6.73	93829	55414
199	Kalimantan Barat	2023	0.32	5.05	70.47	6.71	148920	56233
200	Kalimantan Barat	2024	0.31	4.86	70.13	6.32	154161	56955
201	Kalimantan Tengah	2015	0.30	4.54	68.53	5.94	12701	24973
202	Kalimantan Tengah	2016	0.35	4.82	69.13	5.66	81791	25363
203	Kalimantan Tengah	2017	0.33	4.23	69.79	5.37	30378	25748
204	Kalimantan Tengah	2018	0.34	3.91	70.42	5.17	130916	26126
205	Kalimantan Tengah	2019	0.34	4.04	70.91	4.98	85919	26498
206	Kalimantan Tengah	2020	0.32	4.58	72.62	4.82	37100	26863
207	Kalimantan Tengah	2021	0.32	4.53	72.81	5.16	63598	27022
208	Kalimantan Tengah	2022	0.31	4.26	73.17	5.28	65568	27411
209	Kalimantan Tengah	2023	0.32	4.10	73.73	5.11	87795	27737
210	Kalimantan Tengah	2024	0.30	4.01	72.73	5.17	152293	28097
211	Kalimantan Selatan	2015	0.33	4.92	68.38	4.99	20604	39907
212	Kalimantan Selatan	2016	0.35	5.45	69.05	4.85	61630	40495
213	Kalimantan Selatan	2017	0.35	4.77	69.65	4.73	29819	41068
214	Kalimantan Selatan	2018	0.34	4.35	70.17	4.54	99752	41624
215	Kalimantan Selatan	2019	0.33	4.18	70.72	4.55	100610	42163
216	Kalimantan Selatan	2020	0.35	4.47	73.09	4.38	42863	42686
217	Kalimantan Selatan	2021	0.33	4.95	73.45	4.83	110039	41226
218	Kalimantan Selatan	2022	0.31	4.74	74.00	4.49	123104	41821
219	Kalimantan Selatan	2023	0.31	4.31	74.66	4.29	149094	42223
220	Kalimantan Selatan	2024	0.30	4.20	73.03	4.11	165793	42734
221	Kalimantan Timur	2015	0.32	7.50	74.17	6.23	96113	34313
222	Kalimantan Timur	2016	0.33	7.95	74.59	6.11	68851	34796
223	Kalimantan Timur	2017	0.33	6.91	75.12	6.19	109802	35271

224	Kalimantan Timur	2018	0.34	6.41	75.83	6.03	259420	35738
225	Kalimantan Timur	2019	0.34	5.94	76.61	5.94	219520	36197
226	Kalimantan Timur	2020	0.34	6.87	75.94	6.10	259340	36647
227	Kalimantan Timur	2021	0.33	6.83	76.60	6.54	302974	38082
228	Kalimantan Timur	2022	0.32	5.71	77.36	6.31	395956	38598
229	Kalimantan Timur	2023	0.32	5.31	78.20	6.11	521717	39097
230	Kalimantan Timur	2024	0.31	5.14	78.83	5.78	550789	40459
231	Kalimantan Utara	2015	0.31	5.68	68.76	6.24	9218	6445
232	Kalimantan Utara	2016	0.31	5.23	69.20	6.23	33457	6573
233	Kalimantan Utara	2017	0.31	5.54	69.84	7.22	8533	670
234	Kalimantan Utara	2018	0.30	5.11	70.56	7.09	13568	6828
235	Kalimantan Utara	2019	0.29	4.49	71.15	6.63	44009	6956
236	Kalimantan Utara	2020	0.30	4.97	71.00	6.80	22352	7084
237	Kalimantan Utara	2021	0.29	4.58	71.57	7.36	37925	7136
238	Kalimantan Utara	2022	0.27	4.33	72.21	6.77	75264	7278
239	Kalimantan Utara	2023	0.28	4.01	72.88	6.45	81991	730
240	Kalimantan Utara	2024	0.26	3.90	73.02	6.32	119245	7398
241	Sulawesi Utara	2015	0.37	9.03	70.39	8.65	2706	24097
242	Sulawesi Utara	2016	0.38	8.18	71.05	8.34	50696	24322
243	Sulawesi Utara	2017	0.39	7.18	71.66	8.10	14882	24537
244	Sulawesi Utara	2018	0.37	6.61	72.20	7.80	43201	24744
245	Sulawesi Utara	2019	0.38	6.01	72.99	7.66	82596	24941
246	Sulawesi Utara	2020	0.37	7.31	73.67	7.62	30056	25129
247	Sulawesi Utara	2021	0.36	7.06	74.03	7.77	34800	26386
248	Sulawesi Utara	2022	0.36	6.61	74.52	7.28	50421	26595
249	Sulawesi Utara	2023	0.37	6.10	75.04	7.38	76982	26815
250	Sulawesi Utara	2024	0.35	5.85	75.03	7.25	57839	27018
251	Sulawesi Tengah	2015	0.37	4.10	66.76	14.66	9684	28780
252	Sulawesi Tengah	2016	0.35	3.29	67.47	14.45	10812	29198
253	Sulawesi Tengah	2017	0.35	3.81	68.11	14.14	19297	29611
254	Sulawesi Tengah	2018	0.32	3.37	68.88	14.01	84889	30019
255	Sulawesi Tengah	2019	0.33	3.11	69.50	13.48	44388	30421
256	Sulawesi Tengah	2020	0.32	3.77	70.31	12.92	52613	30817
257	Sulawesi Tengah	2021	0.33	3.75	70.54	13.00	30123	30219
258	Sulawesi Tengah	2022	0.31	3.00	71.01	12.33	37586	30661
259	Sulawesi Tengah	2023	0.30	2.95	71.66	12.41	47725	30868
260	Sulawesi Tengah	2024	0.31	2.94	71.56	11.77	45930	31218
261	Sulawesi Selatan	2015	0.40	5.95	69.15	9.39	92153	85208

262	Sulawesi Selatan	2016	0.40	4.80	69.76	9.40	33346	85986
263	Sulawesi Selatan	2017	0.43	5.61	70.34	9.38	19694	86744
264	Sulawesi Selatan	2018	0.39	4.94	70.90	9.06	32759	87481
265	Sulawesi Selatan	2019	0.39	4.62	71.66	8.69	56726	88195
266	Sulawesi Selatan	2020	0.38	6.31	73.08	8.72	91420	88888
267	Sulawesi Selatan	2021	0.38	5.72	73.38	8.78	120754	91395
268	Sulawesi Selatan	2022	0.37	4.51	73.96	8.63	75280	92258
269	Sulawesi Selatan	2023	0.38	4.33	74.60	8.70	114683	93623
270	Sulawesi Selatan	2024	0.36	4.19	74.05	8.06	84120	94634
271	Sulawesi Tenggara	2015	0.38	5.55	68.75	12.90	20154	25027
272	Sulawesi Tenggara	2016	0.39	2.72	69.31	12.88	17942	25431
273	Sulawesi Tenggara	2017	0.40	3.30	69.86	12.81	31487	25834
274	Sulawesi Tenggara	2018	0.39	3.19	70.61	11.63	16034	26236
275	Sulawesi Tenggara	2019	0.39	3.52	71.20	11.24	38271	26637
276	Sulawesi Tenggara	2020	0.39	4.58	71.61	11.00	28657	27035
277	Sulawesi Tenggara	2021	0.39	3.92	71.82	11.66	43342	26592
278	Sulawesi Tenggara	2022	0.37	3.36	72.38	11.17	75960	27017
279	Sulawesi Tenggara	2023	0.37	3.15	72.94	11.43	77346	27490
280	Sulawesi Tenggara	2024	0.37	3.09	73.48	11.21	55173	27931
281	Gorontalo	2015	0.40	4.65	65.86	18.32	943	11336
282	Gorontalo	2016	0.41	2.76	66.29	17.72	22025	11448
283	Gorontalo	2017	0.41	4.28	67.01	17.65	8884	11556
284	Gorontalo	2018	0.42	3.70	67.71	16.81	26668	11661
285	Gorontalo	2019	0.41	3.76	68.49	15.52	8444	11764
286	Gorontalo	2020	0.41	4.28	69.51	15.22	6836	11863
287	Gorontalo	2021	0.41	3.01	69.82	15.61	10043	11810
288	Gorontalo	2022	0.42	2.58	70.62	15.42	11135	11927
289	Gorontalo	2023	0.42	3.06	71.25	15.15	39601	12132
290	Gorontalo	2024	0.41	3.13	71.23	14.57	40039	12278
291	Sulawesi Barat	2015	0.36	3.35	62.96	12.40	11038	12817
292	Sulawesi Barat	2016	0.37	3.33	63.60	11.74	841	13014
293	Sulawesi Barat	2017	0.34	3.21	64.30	11.30	6602	13209
294	Sulawesi Barat	2018	0.37	3.01	65.10	11.25	31442	13401
295	Sulawesi Barat	2019	0.37	2.98	65.73	11.02	11872	13592
296	Sulawesi Barat	2020	0.36	3.32	68.40	10.87	2529	13781
297	Sulawesi Barat	2021	0.37	3.13	68.64	11.29	3953	14368
298	Sulawesi Barat	2022	0.37	2.34	69.19	11.75	13133	14586
299	Sulawesi Barat	2023	0.35	2.27	69.80	11.49	20111	14811

300	Sulawesi Barat	2024	0.33	2.68	68.20	11.21	28930	15032
301	Maluku	2015	0.34	9.93	67.05	19.51	824	16903
302	Maluku	2016	0.34	7.05	67.60	19.18	114	17104
303	Maluku	2017	0.32	9.29	68.19	18.45	523	17302
304	Maluku	2018	0.33	6.95	68.87	18.12	10135	17495
305	Maluku	2019	0.32	6.69	69.45	17.69	2832	17685
306	Maluku	2020	0.33	7.57	71.34	17.44	4748	17871
307	Maluku	2021	0.32	6.93	71.55	17.87	29397	18626
308	Maluku	2022	0.31	6.88	72.04	15.97	611	18817
309	Maluku	2023	0.29	6.31	72.75	16.42	19045	19205
310	Maluku	2024	0.29	6.11	71.57	16.05	15695	19456
311	Maluku Utara	2015	0.29	6.05	65.91	6.84	482	11671
312	Maluku Utara	2016	0.31	4.01	66.63	6.33	88	11845
313	Maluku Utara	2017	0.33	5.33	67.20	6.35	11506	12017
314	Maluku Utara	2018	0.34	4.63	67.76	6.64	22763	12188
315	Maluku Utara	2019	0.31	4.81	68.70	6.77	6827	12357
316	Maluku Utara	2020	0.29	5.15	69.30	6.78	6621	12523
317	Maluku Utara	2021	0.28	4.71	69.56	6.89	26653	12992
318	Maluku Utara	2022	0.31	3.98	70.26	6.23	34149	13193
319	Maluku Utara	2023	0.30	4.31	70.98	6.46	69010	13371
320	Maluku Utara	2024	0.30	4.03	71.03	6.32	91348	13556
321	Papua Barat	2015	0.43	8.08	61.73	25.82	634	876
322	Papua Barat	2016	0.40	7.46	62.21	25.43	106	8976
323	Papua Barat	2017	0.39	6.49	62.99	25.10	592	9194
324	Papua Barat	2018	0.39	6.45	63.74	23.01	509	9414
325	Papua Barat	2019	0.38	6.43	64.70	22.17	3802	9636
326	Papua Barat	2020	0.38	6.80	65.94	21.37	19254	986
327	Papua Barat	2021	0.37	5.84	66.11	21.84	6356	11568
328	Papua Barat	2022	0.38	5.37	66.72	21.33	21391	11833
329	Papua Barat	2023	0.37	5.38	67.47	20.49	12619	11873
330	Papua Barat	2024	0.39	4.13	67.02	21.66	13779	5787
331	Papua	2015	0.39	3.99	57.25	28.17	12752	31538
332	Papua	2016	0.40	3.35	58.05	28.54	2205	32034
333	Papua	2017	0.40	3.62	59.09	27.62	12179	32522
334	Papua	2018	0.40	3.00	60.06	27.74	1046	33002
335	Papua	2019	0.39	3.51	60.84	27.53	5677	33471
336	Papua	2020	0.40	4.28	61.22	26.64	27222	33931
337	Papua	2021	0.40	3.33	61.40	26.86	9108	43554

338	Papua	2022	0.39	2.83	62.16	26.56	13118	44186
339	Papua	2023	0.39	2.67	63.01	26.03	11741	44827
340	Papua	2024	0.41	6.48	68.63	17.26	9748	10606

LAMPIRAN II

Regresi Command

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/01/26
 Time: 14:28
 Sample: 2015 2024
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.410155	0.093935	4.366364	0.0000
PENGANGGURAN	0.005542	0.001891	2.931430	0.0042
IPM	-0.002067	0.001318	-1.568314	0.1202
KEMISKINAN	0.002995	0.000700	4.280003	0.0000
INVESTASI	5.04E-08	2.89E-08	1.740420	0.0851
PENDUDUK	-5.46E-08	7.42E-08	-0.736756	0.4631
R-squared	0.255766	Mean dependent var	0.321600	
Adjusted R-squared	0.216179	S.D. dependent var	0.026995	
S.E. of regression	0.023900	Akaike info criterion	-4.571783	
Sum squared resid	0.053692	Schwarz criterion	-4.415473	
Log likelihood	234.5892	Hannan-Quinn criter.	-4.508522	
F-statistic	6.460856	Durbin-Watson stat	0.412095	
Prob(F-statistic)	0.000033			

Sumber : EViews (data diolah)

LAMPIRAN III

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.370199	(9,85)	0.0000
Cross-section Chi-square	168.275790	9	0.0000

Sumber : EViews (data diolah)

LAMPIRAN IV

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.533335	5	0.2577

Sumber : EViews (data diolah)

LAMPIRAN V

Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null

hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	204.7273 (0.0000)	0.017212 (0.8956)	204.7446 (0.0000)
Honda	14.30830 (0.0000)	-0.131196 (0.5522)	10.02472 (0.0000)
King-Wu	14.30830 (0.0000)	-0.131196 (0.5522)	10.02472 (0.0000)
Standardized Honda	19.89493 (0.0000)	0.230652 (0.4088)	9.137720 (0.0000)
Standardized King-Wu	19.89493 (0.0000)	0.230652 (0.4088)	9.137720 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	204.7273 (0.0000)

Sumber : EViews (data diolah)

LAMPIRAN VI

Uji Random Effect Model

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/01/26 Time: 15:21
 Sample: 2015 2024
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.562345	0.079035	7.115169	0.0000
PENGANGGURAN	0.000687	0.001346	0.510302	0.6110
IPM	-0.003783	0.000965	-3.921540	0.0002
KEMISKINAN	0.003085	0.001645	1.875801	0.0638
INVESTASI	-1.61E-08	1.92E-08	-0.838349	0.4040
PENDUDUK	3.70E-09	1.90E-07	0.019524	0.9845

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.024087	0.8317
Idiosyncratic random	0.010835	0.1683

Weighted Statistics

R-squared	0.477494	Mean dependent var	0.045293
Adjusted R-squared	0.449701	S.D. dependent var	0.014725
S.E. of regression	0.010923	Sum squared resid	0.011216
F-statistic	17.18042	Durbin-Watson stat	1.571530
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.054905	Mean dependent var	0.321600
Sum squared resid	0.068183	Durbin-Watson stat	0.258512

Sumber : EViews (data diolah)

LAMPIRAN VII

Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.562345	0.079035	7.115169	0.0000
PENGANGGURAN	0.000687	0.001346	0.510302	0.6110
IPM	-0.003783	0.000965	-3.921540	0.0002
KEMISKINAN	0.003085	0.001645	1.875801	0.0638
INVESTASI	-1.61E-08	1.92E-08	-0.838349	0.4040
PENDUDUK	3.70E-09	1.90E-07	0.019524	0.9845

Sumber : EViews (data diolah)